



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rumah DP 0 Rupiah Jadi Prioritas

Anggaran Diambil dari Silpa 2017 Sebesar Rp13,1 Triliun

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan program rumah DP 0 Rupiah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017.

Kebijakan tersebut menyusul dipapornakannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 kemarin.

"Pemprov DKI akan memaksimalkan dana silpa sebesar Rp13,1 triliun untuk program rumah DP 0 Rupiah di beberapa lokasi. Akan diajukan saat pembahasan APBD Perubahan 2018. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyusun rancangan kegiatan pemerintah daerah (RKPD) APBD Perubahan," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah kemarin.

Saefullah menjelaskan, pembangunan rumah DP 0 Rupiah pada 2018 bukan hanya dilakukan di Pondok Kelapa. Sejumlah lokasi yang telah disiapkan antara lain di depo *light rail transit* (LRT) di Jalan Pegangsaan II, Jakarta Utara dan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur.

Pemprov DKI akan memaksimalkan dana Silpa sebesar Rp13,1 triliun untuk program rumah DP 0 Rupiah di beberapa lokasi.

SAEULLAH
Sekretaris Daerah DKI Jakarta

Nantinya, lanjut Saefullah, Pemprov DKI akan meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun rusunami yang akan masuk ke dalam skema pembiayaan DPRp0. Menurut dia, jumlah unit yang akan dibangun oleh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI itu terbilang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi *backlog* perumahan, khususnya hunian bagi masyarakat kelas menengah Ibu Kota.

"Di Depo LRT Pegangsaan saja, rencananya akan dibangun lima tower dengan total 1.200 unit. Saya kira jumlah ini cukup signifikan dan akan dikerjakan oleh Jakpro," ungkapnya.

Selain itu, kata Saefullah PT Jakpro juga memiliki lahan di Jalan Ahmad Yani seluas 3.000 m2 dan beberapa lokasi di kawasan Korotan, Jakarta Utara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak unit rumah DP Rp0.

Kendati demikian, dia belum bisa merjabarkan berapa dana yang disiapkan untuk pembangunan rusunami DP Rp0 pada tahun ini yang diambil dari Silpa.

"Untuk anggarannya, kami akan rapatkan terlebih dahulu. Ini kan baru disetujui, butuh sekitar 2-3 hari akan diselesaikan di internal eksekutif," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya un-

tuk membangun proyek percontohan rusunami DP Rp0 di Jakarta Timur yang diberi nama Klapa Village.

PD Pembangunan Sarana Jaya Menggandong PT Totalindo Eka Persada Tbk Sarana Jaya memiliki porsi mayoritas dalam kerja sama operasional (KSO) dengan Totalindo, yakni 75%. Keduanya akan membangun dua tower hunian di lahan 1,4 ha di mana satu tower dengan kapasitas 703 unit dengan klasifikasi tipe 21 dan tipe 36.

Sementara itu, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono akan melihat terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2018. Menurutnya, dari situ lah RKPD bisa terlihat, apakah program DP 0 Rupiah masuk dan bagaimana pengalokasiannya. "Kita tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju penggunaan Silpa 2017 untuk program DP 0 Rupiah sebelum melihat RKPD-nya," ujarnya.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan terhadap program DP 0 Rupiah, kata Gembong, masih belum jelas arahnya. Mulai peruntukan hingga skema pembiayaannya. Apalagi, pembangunan yang sudah *diground breaking* di kawasan Pondok Kelapa tidak berjalan.

Artinya, lanjut Gembong, DKI lebih baik mematangkan terlebih dahulu kajian program DP 0 Rupiah sehingga pengalo-

kasian anggaran tidak menjadi Silpa kembali. "Dalam pandangan yang kami sampaikan terhadap LKPJ APBD 2017, jangan sampai Silpa 2018 lebih besar daripada 2017. Nah, kalau tidak jelas programnya, ya jadi Silpa lagi," tegasnya.

► himasetiyadi

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rumah DP 0 Rupiah Jadi Prioritas

MEREALISASIKAN RUMAH MURAH

Pemprov DKI Jakarta terus merealisasikan janjinya membangun hunian dengan skema DP 0 Rupiah. Salah satunya dengan mengalokasikan dari dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp13,1 triliun.

TAHAPAN PELAKSANAAN

- Developer membangun rumah/apartemen
- Jika rumah tersedia, warga bisa mengajukan permohonan dan bantuan pembiayaan ke kesatuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- BLUD melakukan pemeriksaan awal dokumen sesuai persyaratan
- Bila disetujui oleh BLUD, dokumen akan dikirimkan ke lembaga bank/non-bank
- Lembaga bank/non-bank akan melakukan verifikasi keuangan dari pemohon kredit
- Bila disetujui akan dilanjutkan proses perjanjian

LOKASI:

- Begangsaan II Jakarta Utara, lima tower dengan 1.200 unit
- J. Ahmad Yani Jakarta Timur
Luas tanah: 3.200 m²
- Klapa Village Jalan H. Maman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
Luas tanah: 5.680 m²
Luas bangunan: 27.150 m²

Tipe dan luas:

- 1 bed room (BR/Studio) ukuran 21 m²
- 2 bed room (BR) ukuran 36 m²

Jumlah:

- 1 bed room (BR/Studio) sekitar 190 unit
- 2 bed room (BR) sekitar 5-3 unit

Harga jual:

- 1 bed room (BR/Studio) Rp184,8 juta
- 2 bed room (BR) Rp316,8 juta

Ketinggian: 20 lantai

Masa konstruksi: Januari 2018 - Pertengahan 2019

BATASAN HARGA JUAL UNIT

Jakarta Barat: Rp320.000.000

Jakarta Pusat: Rp334.800.000

Jakarta Selatan: Rp334.200.000

Jakarta Utara: Rp345.600.000

Jakarta Timur: Rp316.800.000

PERSYARATAN PEMOHON

- Warga DKI Jakarta
- Fotokopi e-KTP
- Fotokopi KK
- Usia minimal 21 tahun dan sudah berkeluarga
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan murah
- Bukti masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
- SPT Pajak Penghasilan
- Bukti penghasilan dalam satu keluarga tak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Rp7 juta